BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Rina Yanti (2024) Dalam Jurnal Kebijakan Publik Vol. 1. NO. 4, Sekolah Tinggi Ilm Administrasi (STIA) Amuntai Program Studi Administrasi Publik dalam penelitian dengan berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Danau Panggang)". Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif tipe deskriptif. Hasil penelitian ini Pasar Danau Panggang merupakan salah satu pasar pemerintah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya berada di Kecamatan Danau Panggang. Penelitian ini dilatarbelakangi yaitu masih kurangnya informasi dari dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) UPT pasar terkait Peraturan Daerah No. 17 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menginterpretasikan Implementas Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian dekriptip kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil sampel secara Purposive Sampling data sebanyak 10 orang. Data di analisis dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trigulasi, dan mengadakan member check. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Kurang baik dilihat di indikator berikut yaitu indikator yang kurang terimplemetasi dengan baik; kejelasan standar, tujuan kebijakan, sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, pola-pola hubungan, kondisi sosial, dan tingkat komitmen. Indikator yang cukup baik; normanorma dan kondisi ekonomi. Sedangkan indikator yang sudah baik; komunikasi dengan instansi lain, koordinasi dengan instansi lain, struktur birokrasi, kondisi politik, tanggapan pelaksana, dan pemahaman pelaksana. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan No. 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi dua. Pertama, faktor pendorong yakni adanya koordinasi dengan instansi lain. Kedua, faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi terhadap pedagang maupun masyarakat mengenai Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan kurang pmaksimalnya para pelaksana serta fasilitas yang kurang memadai. Agar Implementasi berjalan dengan baik, maka kepada Kepala UPT Pasar Kabupaten Hulu Sungai Utara hendaknya lebih memperhatikan sarana dan prasarana pada pasar Danau Panggang, juga rutin dan berkelanjutran dalam melakukan sosialisasi tentang Peraturan No. 17 Tahun 2013 Tentang

Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar informasi terkait perda dapat di terima secara utuh dan merata oleh pedagang.

2. Iwan (2025) Dalam Jurnal Kebijakan Publik JIL 2 NO. 3 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai Program Studi Administrasi Publik dalam penelitian dengan berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara No 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Pinang Habang). Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif tipe deskriptif. Hasil penelitian. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar menegaskan bahwa pasar harus dikelola secara bertahap dan berkesinambungan guna memastikan keberlanjutan fungsinya sebagai pusat aktivitas ekonomi bagi pedagang dan pembeli. Fenomena masalah yang ditemukan peneliti yaitu tidak adanya himbauan dari pihak pengelola pasar terkait menjaga kebersihan pasar, sebagian tempat berjualan di pasar terlihat rusak dan akses jalan yang becek serta berlubang, kurangnya pengawasan dari dinas pengelola pasar dalam menjaga ketertiban dan kebersihan Pasar Pinang Habang diakibatkan kurangnya petugas keamanan. Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Pinang Habang) dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Sumber data diperoleh melalui teknik snowball sampling dengan jumlah informan sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian

dianalisis dengan proses pengumpulan, kondensasi, dan penyajian data. Untuk mengevaluasi kredibilitas data digunakan beberapa metode seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan referensi, serta melakukan member check. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Pinang Habang) kurang baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator yang kurang baik yaitu penyampaian informasi, kejelasan informasi, konsistensi, ketersediaan petugas, kompetensi atau kemampuan petugas, sumber daya finansial, sifat demokrasi dan SOP. Adapun indikator yang sudah baik yaitu kejujuran petugas sedangkan indikator yang cukup baik yaitu komitmen petugas dan pembagian wewenang. Faktor yang mendukung implementasi tersebut yaitu petugas yang jujur dalam menjalankan tugas, petugas yang sudah komitmen dan pembagian tugas yang baik antar petugas. Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya sosialisasi, tidak adanya kejelasan informasi, kurangnya konsisten petugas dalam menyampaikan informasi, kurangnya tenaga kerja yang memadai, kurangnya anggaran, kurangnya kepatuhan dan kemampuan petugas, petugas yang belum memberikan sarana kepada masyarakat untuk memberikan keluhan dan saran dan SOP yang belum berjalan dengan maksimal. Untuk meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Pinang Habang), disarankan Kepada Kepala Dinas Perdagangan agar meningkatkan upaya sosialisasi terhadap isi Peraturan Daerah agar bisa dipahami oleh semua pihak, perlu

merekrut tenaga kerja tambahan untuk petugas kebersihan dan pengawasan pasar. Kepada Petugas Pasar diharapkan mampu menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Kepada Pedagang agar menjaga kebersihan lapak masing-masing dan tidak membuang sampah sembarangan. Kepada Masyarakat untuk tidak membuang sampah secara berserakan diarea pasar dan tetap menjaga fasilitas yang sudah disediakan serta aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja petugas pasar.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi kebijakan yang dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undangundang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor,organisasi, prosedu dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatau sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan

sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carringout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Adapun model-model implementasi kebijakan publik sebagai berikut:

1) Implementasi Kebijakan Model George C. Edward

   Dalam Pandangan George C. Edward dalam Abdal (2025:148-149)Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi merupakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
b) Sumberdaya yang walaupun isi kebijakannya sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumberdaya finansial.
c) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis Apabila implementator memiliki disposisi yang baik maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
d) Struktur birokrasi merupakan struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting di setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating procedures) atau SOP.

2) Implementasi Kebijakan Model Van Metter dan Carl Van Horn

Adapun enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2020:150-153) yang mempengaruhi kin erja implementasi kebijakan publik:

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, dimana kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanyajika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.
b) Sumber daya, dimana keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi dan sumber daya lain yang perlu diperhitungkan adalah sumber daya finansial dan waktu.

c) Karakteristik agen pelaksana, dimana pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat pengimplementasian kebijakan publik
d) Sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana merupakan sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik
e) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mana ini perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan publik yang ditetapkan.

3) Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grandle

Ada dua variabel menurut Merilee S. Grandle dalam Leo Agustino (2022:159-162) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai tidaknya tujuan yang ingin diraih) Yang mana hal ini dapat dilihat dai dua hal berikut:

a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksana kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan menunjuk pada aksi kebijakannya.
b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok serta tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan di tentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing – masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan George C. Edward

dalam Abdal (2025:148-149), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implemetor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target guop) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal kertas menjadi dokumen saja.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik, seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standard operating procedures atau yang disingkat SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara sederhana adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Sedangkan secara umum, pengertian kebijakan publik adalah

segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan antarwarga maupun warga dengan pemerintah.

Kebijakan secara efistimologi, istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris "policy". Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Kebijkan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihanpilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinargi, kompromi atau bahkan kompetensi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingankepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

> "Menurut Thomas R. Dye dalam Leo Agustino (2022:168-169) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah."

Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bentuk-bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik atau kebijakan umum merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata

lain, kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

a. Tahap – tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, heberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip dalam buku Muhammad Sawir, dkk (2025:6-8) adalah sebagai berikut :

1) Tahap Penyusunan Agenda
   Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
2) Tahap Formulasi Kebijakan
   Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
3) Tahap Adopsi Kebijakan
   Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuranukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

3. Pengelolaan Pasar

a. Definisi Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam buku Anna Sopanah, Renny Kurniawati, Dwi Anggraini (2023:41) pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

"Menurut George R. Terry dalam buku Saifuddin (2018:53), pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain."

Adapun pendapat dari prajudi Atmosudirjo dalam buku Saifuddin (2018:53), pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor seumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelsaian suatu tujuan kerja tertentu.

STIA AMUNTAI

Sedangkan menurut Rebert T. Kiyaso dan Sharon L, pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya dan terutama pengelolaan informasi. Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian pekerjaan atau asaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

b. Asas Pengelolaan

Adapaun asas pengelolaan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu sebagai berikut:

1) Kemanusiaan
2) Keadilan
3) Keamanaan kedudukan
4) Ketertiban dan kepuasan hukum
5) Kelestarian lingkungan
6) Kejujuran usaha
7) Persaingan sehat (fairnees)

4. Pengertian Pasar

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian, sebagai pengaturan yang

memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar dan memisahkan pasar dari perdagangan.

Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tuga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan.

A. Klasifikasi Pasar

Adapun klasifikasi pasar adalah sebagai berikut:

1) Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari koiskios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

2) Pasar Modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak berinteraksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh premuniaga. Barang- barang yang dijual, selain bahan makanan seperti buah, sayuran, daging. Sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama.

B. Jenis – jenis Pasar

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Jenis pasar memiliki beragam kategori, yaitu sebagai berikut:

1) Jenis - jenis pasar berdasarkan bentuk kegiatannya
    a) Pasar nyata (konkret)

        Pasar nyata atau pasar konkret merupakan suatu pasar dimana terdapat beragam jenis barang yang diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh dari pasar nyata ini ialah pasar swalayan dan juga pasar tradisional.

    b) Pasar tidak nyata (abstrak)

        Pasar tidak nyata atau pasar abstrak merupakan suatu pasar dimana proses jual beli tidak dilakukan secara langsung, tetapi hanya menggunakan surat dagang saja. Contoh dari pasar tidak nyata ini adalah pasar online, pasar modal dan pasar saham.

2) Jenis – jenis pasar berdasarkan transaksinnya
    a) Pasar tradisional

        Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para pembeli dan penjual bisa saling tawar menawar secara langsung.

    b) Pasar modern

        Pasar modern adalag pasar yang bersifat modern dimana terdapat beragam macam baramg yang diperjualbelikan dengan harga yang telah pas dan dengan layanan yang mandiri.

3) Jenis – jenis pasar berdasarkan jenis barangnya
    a) Pasar barang kosumsi

Pasar barang konsumsi ialahh suatu pasar yang memperjualbelikan beragam jenis barang yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhankebutuhan kehidupan sehari-hari manusia.

b) Pasar sumber daya produksi

Pasar sumber daya produksi adalah suatu pasar yang memperjualbelikan barang-barang atau jasa faktor-faktor produksi. Misalnya tenaga kerja, mesim-mesin dan tenaga ahli.

4) Jenis – jenis pasar berdasarkan waktunya

a) Pasar harian

Pasar harian adalah tempat dimana pertemuan antara pembeli serta penjual yang bisa dilakukan setiap harinya. Umumnya menjual beragam jenis barang kebutuhan konsumsi, kebutuhan bahan mentah, kebutuhan jasa, serta kebutuhan produksi.

b) Pasar mingguan

Pasar mingguan adalah pasar yang melakukan kegiatannya setiap seminggu sekali.

c) Pasar bulanan

Pasar bulanan adalah pasar yang melakukan kegiatannya sebulan sekali dan hanya terdapat di daerah-daerah tertentu, para pembeli dipasar ini membeli barang-barang tertentu dan kemudian dijual kembali. Contohnya seperti pasar hewan.

d) Pasar tahunan

Pasar tahunan adalah pasar yang diselenggarakan tiap setahun sekali. Pasar tahunan bersifat nasional dan diperuntukan untuk promosi

terhadap sebuah produk baru. Contoh pasar tahunan seperti pameran pembangunan, Pekan Raya dan lain-lain.

e) Pasar kontemporer

Pasar kontemporer adalah pasar yang diselenggarakan hanya pada waktu tertentu serta pasar temporer bisa terjadi secara tak rutin atau hanya sekali saja. Contohnya seperti bazar.

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan modern dalam skala besar, maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya pemberdayaan terhadap keberadaan pasar daerah agar dapat tumbuh dan berkembang, saling memperkuat dan menguntungkan. Mengingat sektor jasa dan perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan suatu potensi yang kuatdalam menopang keberlangsungan perekonomian rakyat. Perkembangan dan pertumbuhan usaha perdagangan modern akhir-akhir ini semakin meningkat, namun di sisi lain kondisi sarana belanja khususnya yang dihuni oleh usaha mikro dan usaha kecil yang ada dipasar daerah perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan dalam bentuk perlindungan pasar-pasar tradisional/modern maupun pemberian kesempatan berusaha melalui partisipasi pengusaha perbelanjaan dalam penyediaan tempat usaha. Pengaturan khusus terhadap pengelolaan perpasaran, khususnya pasar daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum pernah ada, oleh karenanya dengan peraturan daerah ini diharapkan mampu untuk memberikan inspirasi, motivasi dan kebijakan solutif terhadap pengelolaan pasar baik sekarang maupun yang akan datang, agar lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya mengelola pasar tradisional/modern miliknya yang merupakan aset-aset penting agar dapat:

a) Mewujudkan keberadaan pasar tradisional/modern yang bersih, aman, nyaman dar berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
b) Menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
c) Mewujudkan pasar daerah sebagai entitas ekonomi, wahana interaksisosial dan sumber pendanaan; serta
d) Memberikan perlindungan, dan pemberdayaan baik kepada pedagang maupun konsumen, serta penataan pasar.

Dengan demikian pengelolaan pasar adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor seumber daya yang ada di dalam pasar dengan suatu perencanaan bertujuan untuk penyelesaian tujuan pasar yang lebih baik lagi, pengelolaan pasar sebagaimana diatur peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 tahun 2013 pasal 3 Pengelolaan Pasar Daerah bertujuan untuk:

a) Mewujudkan keberadaan pasar yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
b) Menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
c) Meningkatkan peran pasar sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan:

d) Memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya, dan

e) Memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah jalan pemikiran dari penulis atau mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus/judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dalam rumusan penelitian ini.

Dalam pengelolaan Pasar Induk Amuntai yang berada di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah masih ada pedagang yang melakukan terhadap pengelolaan ataupun penataan tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah dan merekapun tidak menghiraukan aturan yang sudah ditetapkan malah masih banyak pedagang berjualan diarea yang dilarang untuk berjualan.

Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 di pasar induk amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sudah dijelaskan dalam Bab I Pasal 1 ayat (19) Tentang Pengelolaan Pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung oleh Pemerintah Daerah atau BUMD yang ditunjuk, baik terhadap pasar tradisional, pasar khusus, ataupun pasar sementara dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang meliputi perlindungan, penataan, dan pemberdayaan.

Dan di gambarkan pada Kerangka Pemikiran sebagai berikut

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

